

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan diakui secara luas sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia dan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif teori modal manusia, peningkatan kualitas pendidikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu negara di tingkat global. Pendidikan juga memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, belanja pendidikan publik menjadi salah satu instrumen kebijakan utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Khodjamuratova, 2024).

Pada tataran global, berbagai lembaga internasional seperti *World Bank* dan UNESCO secara konsisten menekankan pentingnya komitmen anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan. Belanja pendidikan yang memadai dan berkelanjutan terbukti berkorelasi positif dengan capaian pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan indikator pembangunan manusia. Meskipun demikian, realitas menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antarnegara, baik dari sisi besaran belanja pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dari segi struktur dan prioritas pengeluarannya (*World Bank*, 2024).

Kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN-6 yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Kamboja,

merupakan wilayah dengan dinamika pembangunan ekonomi yang relatif pesat dalam dua dekade terakhir. Integrasi ekonomi regional melalui ASEAN diharapkan mampu mendorong konvergensi pembangunan sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Namun, meskipun berada dalam satu kawasan yang relatif terintegrasi, negara-negara ASEAN-6 menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dalam tingkat dan pola belanja pendidikan publik. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut melalui perbandingan belanja pendidikan publik sebagai persentase dari PDB pada negara-negara ASEAN-6, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Table 1.1 Tren Belanja Pendidikan 10 tahun terakhir

Belanja pendidikan(% dari PDB)						
Tahun	Negara					
	Indonesia	Malaysia	Filiphina	Thailand	Vietnam	Kamboja
2014	3.28801	5.21264	2.664542	3.919178	3.540123	1.4469
2015	3.5836	4.89487	2.830523	3.863976	3.416604	1.486017
2016	1.210235	4.75192	3.301281	3.767618	3.46907	1.525135
2017	1.053244	4.67531	3.963841	3.465321	3.418657	1.564252
2018	0.994436	4.47865	3.855028	3.197694	3.29537	1.60337
2019	0.964399	4.15776	3.407486	3.022214	3.084998	2.133454
2020	1.015932	3.91176	3.858291	3.153142	3.216529	2.247646
2021	1.032218	4.261094	3.872498	2.982124	2.945175	1.962327
2022	0.863943	3.499338	3.579601	2.61187	2.887387	1.957933
2023	1.275171	3.5148	3.623686	2.521222	2.829599	2.180913

Sumber: World Bank

Berdasarkan data *World Bank* yang telah diolah dalam penelitian ini, belanja pendidikan sebagai persentase PDB di negara ASEAN-6 periode 2014–2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan antarnegara maupun antarwaktu. Malaysia secara relatif konsisten mengalokasikan belanja pendidikan di atas 4 persen PDB pada sebagian besar periode pengamatan, mencerminkan komitmen fiskal yang kuat terhadap sektor pendidikan.

Sebaliknya, Indonesia mengalami penurunan tajam belanja pendidikan terhadap PDB setelah tahun 2015, hingga berada di bawah 1,5 persen PDB pada beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Kamboja mencatat tingkat belanja pendidikan yang relatif rendah, namun menunjukkan tren peningkatan sejak 2019 seiring dengan upaya memperkuat sektor pendidikan di tengah keterbatasan fiskal.

Perbedaan tingkat belanja tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menjamin peningkatan anggaran pendidikan. Negara dengan kinerja ekonomi stabil tidak selalu meningkatkan proporsi belanja pendidikan terhadap PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor struktural, institusional, dan kebijakan fiskal yang lebih kompleks.

Salah satu faktor yang sering dikaji dalam literatur ekonomi publik adalah kapasitas fiskal pemerintah, yang umumnya diukur melalui rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*). *Tax ratio* mencerminkan kemampuan negara untuk memobilisasi sumber daya domestik guna membiayai pengeluaran publik, termasuk pendidikan. Secara teoretis, negara dengan *tax ratio* tinggi memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai sektor sosial dan investasi jangka panjang (Piancastelli & Thirlwall, 2020).

Namun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa hubungan antara *Tax ratio* dan belanja pendidikan tidak selalu bersifat linear dan konsisten. Di banyak negara berkembang, peningkatan penerimaan pajak tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja pendidikan, karena dana tambahan sering dialokasikan untuk belanja non-sosial seperti subsidi energi, belanja birokrasi,

atau pembayaran utang publik. Fenomena ini relevan dalam konteks ASEAN, mengingat adanya perbedaan kapasitas fiskal dan kualitas institusi antarnegara di kawasan tersebut. (Sawadogo, 2020).

Selain faktor fiskal, kondisi makroekonomi juga berperan penting dalam menentukan kapasitas pemerintah untuk membiayai sektor pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teoritis memperluas basis penerimaan negara, namun belanja pendidikan sering kali bersifat pro-siklikal dan bergantung pada preferensi politik serta prioritas pembangunan nasional masing-masing negara (Suwandaru et al., 2021).

Dalam literatur ekonomi publik modern, aspek tata kelola fiskal menjadi semakin relevan. Transparansi fiskal, yang diukur melalui *Open Budget Index* (OBI), menunjukkan sejauh mana pemerintah membuka informasi anggaran dan memberi ruang bagi partisipasi publik. Tingkat transparansi yang tinggi meningkatkan akuntabilitas fiskal, menekan inefisiensi, dan mendorong alokasi anggaran yang lebih berpihak pada sektor sosial seperti pendidikan (Montes et al., 2019).

Sejumlah studi lintas negara menunjukkan bahwa negara dengan transparansi fiskal yang baik cenderung memiliki belanja pendidikan per kapita lebih tinggi dan distribusi anggaran yang lebih merata. Namun, penelitian empiris mengenai hubungan ini di kawasan ASEAN masih terbatas. Mayoritas studi belum menguji pengaruh transparansi fiskal terhadap belanja pendidikan dalam kerangka panel lintas negara dengan periode pengamatan yang panjang (ElBerry & Goeminne, 2021).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga telah memengaruhi dinamika kebijakan pendidikan global. Digitalisasi sistem pendidikan dan

pembelajaran daring memerlukan investasi besar dalam infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini berdampak langsung terhadap struktur dan besaran belanja pendidikan. (*World Bank*, 2024).

Pandemi COVID-19 mempercepat integrasi teknologi dalam sistem pendidikan, mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana tambahan bagi konektivitas dan pembelajaran daring. Namun, dampak jangka panjang dari digitalisasi terhadap total belanja pendidikan masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian berpendapat bahwa teknologi meningkatkan efisiensi anggaran, sementara yang lain menilai bahwa digitalisasi menciptakan kebutuhan belanja baru yang cukup besar. (Shah, 2024).

Secara umum, meskipun terdapat banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor penentu belanja pendidikan, kajian empiris yang mengintegrasikan dimensi fiskal, ekonomi, tata kelola fiskal, dan perkembangan teknologi masih terbatas, terutama di kawasan ASEAN-6. Sebagian besar penelitian hanya meneliti satu atau dua faktor secara terpisah dengan pendekatan *cross-section* atau *time series* tunggal, sehingga belum mampu memberikan gambaran komprehensif tentang variasi antarnegara dan dinamika jangka panjang kebijakan belanja pendidikan publik di kawasan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengintegrasikan lima faktor utama, yaitu kapasitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, transparansi fiskal, dan perkembangan teknologi, ke dalam satu model panel lintas negara ASEAN-6 selama periode 2008–2023. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh

bukti empiris yang lebih kuat dan menyeluruh mengenai determinan belanja pendidikan publik di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Determinan Belanja Pendidikan di Negara ASEAN-6 Tahun 2008–2023**” dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, transparansi fiskal, dan perkembangan teknologi terhadap belanja pendidikan publik di negara-negara ASEAN-6 selama periode tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh kapasitas fiskal terhadap belanja pendidikan di negara ASEAN-6?
2. Apakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja pendidikan di negara ASEAN-6?
3. Apakah pengaruh transparansi fiskal terhadap belanja pendidikan di negara ASEAN-6?
4. Apakah pengaruh perkembangan teknologi terhadap belanja pendidikan di negara ASEAN-6?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka disajikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap belanja pendidikan di negara-negara ASEAN-6.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja

pendidikan di negara-negara ASEAN-6.

3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi fiskal yang diukur melalui *Open Budget Index* (OBI) terhadap belanja pendidikan di negara-negara ASEAN-6.
4. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan teknologi sebagai indikator perkembangan teknologi terhadap belanja pendidikan di negara-negara ASEAN-6.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi pendidikan dan tata kelola fiskal.

Manfaat Teoretis

- Memperkaya literatur ekonomi publik dan ekonomi pendidikan, khususnya mengenai determinan belanja pendidikan di negara berkembang.
- Mengembangkan pendekatan analitis yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan faktor ekonomi, tata kelola fiskal, dan teknologi dalam satu model empiris.
- Memberikan kontribusi teoretis terkait peran transparansi fiskal dan digitalisasi terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah.
- Menjadi referensi konseptual bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji belanja pendidikan berbasis data panel lintas negara.

Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah ASEAN-6:
Menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan prioritas dan efektivitas belanja pendidikan berdasarkan kondisi ekonomi, tata kelola, dan

perkembangan teknologi.

- Bagi Akademisi dan Peneliti:

Menyediakan model analisis dan data empiris yang dapat digunakan sebagai rujukan atau dikembangkan dalam penelitian lanjutan.

- Bagi Lembaga dan Pemangku Kepentingan:

Memberikan gambaran empiris untuk evaluasi kebijakan pendidikan, program bantuan, serta pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Belanja Pemerintah dan Fungsi Alokasi

Teori belanja pemerintah berakar pada pandangan ekonomi publik yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Menurut Musgrave (1959) dan Stiglitz (2015), fungsi utama pemerintah dalam perekonomian terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang publik, termasuk pendidikan, yang memiliki karakteristik non-rival dan menghasilkan eksternalitas positif bagi masyarakat.

Dalam kerangka ini, belanja pendidikan dipandang sebagai bagian dari belanja publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan efisiensi ekonomi. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk mengoreksi kegagalan pasar, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, besaran belanja pendidikan pemerintah mencerminkan prioritas kebijakan publik dan kapasitas fiskal suatu negara.

Dalam penelitian ini, belanja pendidikan (% PDB) berperan sebagai variabel dependen, yang mencerminkan tingkat komitmen pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi di sektor pendidikan. Variasi belanja pendidikan antarnegara dan antarwaktu dapat dijelaskan melalui perbedaan kondisi fiskal, ekonomi, tata kelola, dan

teknologi.

2.1.2 Teori Modal Manusia (Human Capital Theory)

Teori modal manusia, yang dipelopori oleh Becker (1964), menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan individu di masa depan. Pada tingkat makroekonomi, akumulasi modal manusia melalui pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan daya saing nasional.

Dalam perspektif ini, belanja pendidikan publik dipandang sebagai investasi produktif, bukan sekadar konsumsi pemerintah. Pemerintah yang meningkatkan belanja pendidikan diharapkan mampu mempercepat pembentukan modal manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, teori modal manusia memberikan justifikasi teoretis yang kuat bagi intervensi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan.

Teori ini juga menjelaskan hubungan dua arah antara belanja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, belanja pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya fiskal yang lebih besar untuk membiayai pendidikan. Hubungan timbal balik ini menjadi dasar bagi pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja pendidikan dalam penelitian ini.

2.1.3 Kapasitas Fiskal dan Kapasitas Pajak

Teori kapasitas fiskal menekankan pentingnya kemampuan

negara dalam membiayai pengeluaran publik dari sumber daya domestik, khususnya melalui penerimaan pajak. *Tax ratio*, yaitu rasio penerimaan pajak terhadap PDB, sering digunakan sebagai indikator kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan pemerintah. (Gupta & Keen, 2022).

Menurut Stiglitz (2015), negara dengan *Tax ratio* yang tinggi memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai belanja publik, termasuk belanja pendidikan. Sebaliknya, negara dengan *Tax ratio* rendah cenderung menghadapi keterbatasan fiskal yang membatasi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan belanja sektor sosial. Dengan demikian, *Tax ratio* diharapkan berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan.

Namun, teori juga mengakui bahwa kapasitas fiskal tidak selalu diterjemahkan secara langsung ke dalam peningkatan belanja pendidikan. Preferensi kebijakan, struktur anggaran, dan kualitas institusi fiskal turut menentukan bagaimana penerimaan pajak dialokasikan. Oleh karena itu, hubungan antara *Tax ratio* dan belanja pendidikan perlu diuji secara empiris, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti ASEAN-6.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Publik

Teori pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam kerangka Keynesian dan teori pertumbuhan endogen, menekankan peran pengeluaran pemerintah dalam memengaruhi aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan basis pajak dan penerimaan negara, sehingga secara teoritis memungkinkan

peningkatan belanja publik.

Dalam konteks belanja pendidikan, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai faktor makroekonomi yang memengaruhi kemampuan dan kemauan pemerintah dalam meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar dibandingkan negara dengan pertumbuhan yang volatil.

Namun demikian, teori juga mengakui bahwa pengeluaran pendidikan tidak selalu bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pendidikan sering kali dipengaruhi oleh prioritas politik dan kebijakan jangka panjang, sehingga hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dapat bersifat lemah atau bahkan tidak signifikan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diperlakukan sebagai variabel independen yang perlu diuji secara empiris dalam model penelitian ini.

2.1.5 Teori Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas Anggaran

Teori transparansi fiskal berangkat dari konsep *good Governance* yang menekankan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi fiskal diyakini dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menekan praktik inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran. (Alt & Lassen, 2006).

Dalam konteks belanja pendidikan, transparansi fiskal memungkinkan publik dan lembaga pengawas untuk memantau alokasi dan realisasi anggaran pendidikan, sehingga mendorong

pemerintah untuk mengalokasikan dana secara lebih efektif dan prososial. *Open Budget Index* (OBI) sering digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur tingkat transparansi fiskal suatu negara.

Teori ini mendasari dugaan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi fiskal, semakin besar kemungkinan pemerintah mengalokasikan belanja yang memadai untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, transparansi fiskal diposisikan sebagai variabel institusional yang memengaruhi belanja pendidikan dalam penelitian ini.

2.1.6 Teori Teknologi, Digitalisasi, dan Pembiayaan Pendidikan

Teori ekonomi teknologi dan inovasi menekankan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor publik, termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi dan peningkatan penggunaan Internet telah mengubah cara penyediaan layanan pendidikan melalui pembelajaran daring, digitalisasi administrasi, dan pemanfaatan platform pendidikan digital (UNESCO, 2023).

Dari perspektif pembiayaan publik, digitalisasi pendidikan dapat memiliki dua implikasi. Di satu sisi, teknologi berpotensi meningkatkan efisiensi belanja pendidikan dan mengurangi biaya jangka panjang. Di sisi lain, adopsi teknologi membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur digital, perangkat, dan pelatihan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan belanja pendidikan pemerintah (Margetts & Dunleavy, 2013).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Kapasitas Fiskal dengan Belanja pendidikan

Kapasitas fiskal merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas pemerintah dalam menghimpun sumber daya keuangan domestik, yang umumnya diukur melalui tingkat *Tax ratio*. Dalam perspektif ekonomi publik, kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak menentukan sejauh mana pemerintah dapat menjalankan fungsi alokatifnya, khususnya dalam penyediaan barang publik dan investasi sosial jangka panjang seperti pendidikan. Dengan demikian, belanja pendidikan sangat bergantung pada kekuatan fiskal yang dimiliki oleh suatu negara.

Secara mekanistik, peningkatan kapasitas fiskal akan memperluas ruang fiskal pemerintah, sehingga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar ke sektor pendidikan. Jika *Tax ratio* meningkat, pemerintah tidak hanya mampu membiayai pengeluaran rutin, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan belanja pendidikan tanpa ketergantungan berlebihan pada pembiayaan eksternal atau utang. Sebaliknya, rendahnya *Tax ratio* membatasi kapasitas anggaran negara dan sering kali mendorong pemerintah untuk mengalihkan prioritas belanja ke sektor-sektor yang bersifat mendesak dan jangka pendek, sehingga belanja pendidikan cenderung tertekan.

Hubungan tersebut sejalan dengan teori ekonomi publik yang menekankan bahwa peningkatan penerimaan pajak memperkuat fungsi alokasi pemerintah dalam menyediakan investasi sosial yang

produktif (Musgrave, 1959). Argumen ini diperkuat oleh temuan empiris (Soares et al., 2020) yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat *Tax ratio* yang lebih tinggi cenderung mengalokasikan belanja pendidikan yang lebih besar dan berkelanjutan. Dalam konteks negara ASEAN-6 yang memiliki tingkat kapasitas fiskal yang bervariasi, kapasitas fiskal diperkirakan menjadi determinan penting dalam menjelaskan perbedaan belanja pendidikan antarnegara dan antarperiode. Oleh karena itu, hubungan ini menjadi dasar bagi perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini.

2.2.2 Hubungan Pertumbuhan ekonomi dengan Belanja Pendidikan

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja pendidikan bekerja melalui peningkatan kemampuan fiskal pemerintah. Ketika perekonomian tumbuh, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai sektor-sektor strategis. Namun demikian, peningkatan belanja pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh prioritas kebijakan dan orientasi pembangunan yang dianut pemerintah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja pendidikan apabila sektor pendidikan tidak menjadi fokus utama kebijakan fiskal.

Dalam teori pertumbuhan endogen, pendidikan dipandang sebagai investasi yang saling melengkapi dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Hanushek & Woessmann, 2023). Sejumlah penelitian empiris mendukung pandangan ini, di antaranya

(Suwandaru et al., 2021), yang menemukan bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki belanja pendidikan yang lebih besar, khususnya dalam jangka panjang. Dalam konteks ASEAN-6 yang menunjukkan variasi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkontribusi terhadap perbedaan belanja pendidikan antarnegara dan antarwaktu. Oleh karena itu, hubungan ini menjadi dasar perumusan hipotesis kedua dalam penelitian ini.

2.2.3 Hubungan Transparansi fiskal dengan belanja pendidikan

Transparansi fiskal mencerminkan tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi anggaran kepada publik. Dalam kerangka teori *good Governance*, transparansi fiskal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran publik. Ketika transparansi meningkat, pemerintah menghadapi tekanan publik yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran secara adil dan pro-sosial, termasuk pada sektor pendidikan.

transparansi fiskal mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran. Keterbukaan informasi anggaran mendorong partisipasi publik dan lembaga pengawas dalam mengevaluasi prioritas belanja pemerintah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah cenderung meningkatkan belanja pendidikan sebagai respons terhadap tuntutan akuntabilitas dan kebutuhan sosial masyarakat.

Hubungan ini didukung oleh penelitian Montes (2019), Elberry

(2022), dan *International Budget Partnership* (2024) yang menemukan bahwa tingkat transparansi fiskal yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan belanja pendidikan dan belanja sosial lainnya. Dalam konteks ASEAN-6 yang menunjukkan perbedaan tingkat transparansi fiskal antarnegara, transparansi fiskal diperkirakan menjadi faktor institusional yang memengaruhi variasi belanja pendidikan. Oleh karena itu, hubungan ini menjadi dasar perumusan hipotesis keempat dalam penelitian ini.

2.2.4 Hubungan Perkembangan Teknologi dengan belanja pendidikan

Perkembangan teknologi, yang diukur melalui tingkat penggunaan Internet, mencerminkan sejauh mana suatu negara mengadopsi teknologi informasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, peningkatan penggunaan teknologi informasi berpotensi menciptakan efisiensi dalam penyediaan layanan pendidikan melalui otomatisasi sistem administrasi, digitalisasi kurikulum, dan pemanfaatan platform pembelajaran daring. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat menekan beban pengeluaran pemerintah karena beberapa fungsi pembelajaran dan pengelolaan sekolah dapat dilakukan secara lebih efisien dan terukur. (Liu et al., 2025).

Mekanisme pengaruh perkembangan teknologi terhadap belanja pendidikan terutama terlihat melalui peningkatan efisiensi fiskal dan optimalisasi sumber daya. Setelah fase awal investasi infrastruktur digital, adopsi teknologi secara luas dapat menurunkan

biaya operasional pendidikan, seperti pengadaan bahan ajar fisik, biaya pelatihan konvensional, serta kebutuhan logistik pendidikan. (Dhameria et al., 2025). menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pendidikan, dalam jangka panjang, mampu mengurangi biaya penyelenggaraan pendidikan karena efisiensi yang dihasilkan dari integrasi teknologi.

Dalam konteks negara-negara ASEAN-6, perkembangan teknologi yang semakin pesat diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap belanja pendidikan karena efisiensi digital memungkinkan optimalisasi penggunaan dana publik. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat adopsi teknologi dan pemanfaatan Internet, maka semakin rendah kebutuhan pembiayaan pendidikan secara konvensional. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini menduga bahwa perkembangan teknologi berpengaruh negatif terhadap belanja pendidikan di negara-negara ASEAN-6..

2.3 Studi Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh David Kamar Imana (2017) berjudul “*The Determinants of Public Education Expenditures: An Empirical Analysis of Changing Patterns and Growth of Public Expenditure on Education in Kenya*” yang diterbitkan dalam *Journal of Public Administration and Governance* menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran publik di sektor pendidikan di Kenya. Melalui metode regresi linier berganda, penelitian ini menempatkan variabel ekonomi makro sebagai faktor utama dalam menentukan belanja pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDB per kapita serta tingkat partisipasi pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pendidikan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penggunaan variabel ekonomi makro sebagai determinan belanja pendidikan, namun memiliki perbedaan pada cakupan wilayah yang hanya mencakup satu negara dan belum mengikutsertakan variabel transparansi fiskal serta teknologi secara eksplisit.

Studi lain yang dilakukan oleh Network for International Policies and Advisory Committee on Education (NORRAG) (2020) melalui laporan edisi khusus "*Domestic Financing: Tax and Education*" menyoroti hubungan antara sistem perpajakan dan pembiayaan pendidikan domestik. Dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus lintas negara, laporan ini menegaskan bahwa peningkatan rasio pajak terhadap PDB (*Tax-to-GDP ratio*) merupakan komponen penting dalam memperluas ruang fiskal untuk mendukung pembiayaan pendidikan berkelanjutan. Temuan ini memberikan dasar konseptual yang kuat bagi penggunaan variabel kapasitas fiskal (*Tax ratio*) dalam penelitian ini. Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana studi NORRAG bersifat kualitatif dan normatif, sementara penelitian ini menguji hubungan tersebut secara kuantitatif menggunakan data panel di kawasan ASEAN-6.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Suwandar, Thamer Alghamdi, dan Nurwanto (2021) berjudul "*Empirical Analysis on Public Expenditure for Education and Economic Growth: Evidence from Indonesia*" yang diterbitkan dalam jurnal *Economies* meneliti hubungan antara belanja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Vector

Error Correction Model (VECM), penelitian ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik jangka panjang, di mana pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pendidikan. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi serta konteks kawasan Asia Tenggara, namun penelitian Suwanda dan rekan hanya berfokus pada satu negara, sehingga tidak menggambarkan perbandingan lintas negara yang menjadi fokus penelitian ini.

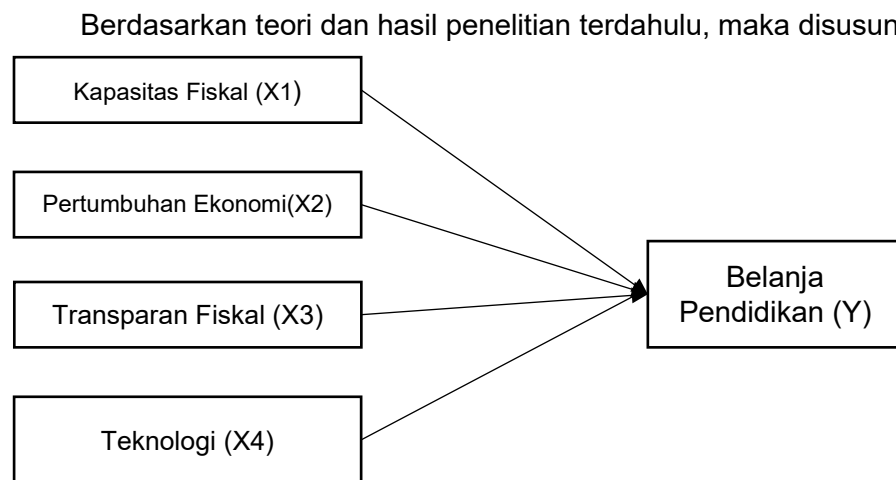
Selanjutnya, penelitian oleh Gabriel Caldas Montes dkk. (2019) yang berjudul "*Fiscal Transparency, Government Effectiveness and Government Spending Efficiency: Some International Evidence Based on Panel Data Approach*" dalam *Economic Modelling* mengkaji pengaruh transparansi fiskal yang diukur dengan *Open Budget Index* (OBI) terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah. Menggunakan data panel lintas negara, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi fiskal berpengaruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi belanja publik. Studi ini menjadi dasar teoretis yang kuat bagi penggunaan variabel OBI dalam penelitian ini, meskipun fokus Montes dan rekan lebih bersifat umum terhadap total belanja pemerintah, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah belanja sektor pendidikan di kawasan ASEAN.

Penelitian yang dilakukan oleh Vita Dhameria dkk. (2025) dalam *International Journal of Educational Qualitative Quantitative Research* berjudul "*The Impact of Digital Transformation in Higher Education Management: Integrating Online Learning and Educational Applications for Efficiency and Accessibility*" meneliti peran transformasi digital dalam

meningkatkan efisiensi institusi dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan perangkat lunak AMOS, penelitian tersebut menemukan bahwa integrasi pembelajaran daring dan penggunaan aplikasi pendidikan berfungsi sebagai variabel mediasi yang secara signifikan meningkatkan efektivitas manajemen serta mendukung akses pendidikan yang lebih luas. Temuan ini memperkuat relevansi penggunaan variabel teknologi dan digitalisasi sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan layanan institusi, yang sejalan dengan urgensi adaptasi teknologi dalam sektor pendidikan *Modern*.

Penelitian terbaru oleh Ouattara Sohlio (2025) berjudul "*The Impact of E-Government on the Efficiency of Public Expenditure on Education in WAEMU*" yang diterbitkan dalam *Journal of Economics, Finance and Management Studies* meneliti pengaruh *E-Government* terhadap efisiensi pengeluaran pendidikan di negara-negara WAEMU. Dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pemerintahan memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pengujian aspek teknologi dan fokus pada sektor pendidikan, namun penelitian Sohlio lebih menitikberatkan pada efisiensi belanja, sementara penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor penentu besaran alokasi anggaran pendidikan serta memasukkan variabel kapasitas fiskal sebagai komponen kapasitas pendanaan.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 kerangka konseptual

kerangka konseptual dengan variabel independen yang terdiri atas kapasitas fiskal (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), transparansi fiskal (X3), dan teknologi (X4), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja pendidikan publik (Y) di negara-negara ASEAN-6.

Empat variabel tersebut dipandang sebagai faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris sekaligus memberikan kontribusi baru dalam memahami determinan belanja pendidikan publik di kawasan ASEAN. Berikut disajikan kerangka konseptual penelitian ini.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut , maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Kemandiri Fiskal diduga berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan.

2. Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan.
3. Transparansi fiskal diduga berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan.
4. Teknologi diduga berpengaruh negatif terhadap belanja pendidikan.